

Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pertahanan Tahun 2022

Arifah Nurhaliza

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

available at <https://www.jisip.org/index.php/sij/article/view/18>
ISSN 2828-0156 ©2025 Sospoli Institute Journal

Manuskrip Diterima: 24 Juni 2025; Disetujui: 29 Juni 2025; Dipublish: 30 Juni 2025.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan implementasi kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Indonesia yang kerap disebut dengan kerjasama Malindo yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2022. Ini merupakan kerjasama yang signifikan yang setiap tahunnya mencerminkan keterkaitan hubungan timbal balik bidang pertahanan antara dua negara yang telah memiliki sejarah hubungan diplomatik yang panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif yang menggabungkan teknik pengumpulan data wawancara dan tinjauan literatur. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerja sama ini dianggap berhasil memperkuat stabilitas keamanan kawasan, meningkatkan profesionalisme personel militer kedua negara melalui transfer pengetahuan, dan membuka peluang pengembangan teknologi pertahanan secara kolektif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam terkait strategi kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Index Terms: kerja sama pertahanan, malindo, latihan militer, keamanan perbatasan, industri pertahanan

Pendahuluan

Hubungan internasional adalah hubungan negara-negara yang kompleks. Kerja sama membantu negara untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Konsep tentang kerja sama merupakan bagian dari pengaruh Teori Hubungan Internasional Liberalisme. Liberalisme adalah teori hubungan internasional yang melihat dunia dalam sudut pandang positif. Immanuel Kant, Bapak Liberalisme Klasik, melihat pada dasarnya seluruh manusia mencintai perdamaian dan cenderung menjauhi konflik. Ia melihat bahwa perdamaian dapat tercipta dengan adanya kerja sama. Pandangan ini juga diperkuat dengan gagasan Woodrow Wilson, pasca Perang Dunia I, yang mempercayai bahwa perdamaian dapat dilakukan bersama sama dalam suatu wadah organisasi yang terintegrasi yang dapat membantu negara-negara menemukan kesamaan untuk dapat bekerja sama daripada konflik yang berujung pada perang dengan dampak yang merugikan. Pada intinya, Liberalisme meyakini bahwa kerja sama dapat mendorong negara-negara menemukan kepentingan yang sama untuk mencapai keuntungan bersama atau win-win game [1].

Kerja sama negara dimotivasi oleh beragam hal. Salah satunya, kerja sama antarnegara dapat

didorong karena negara-negara memiliki perspektif ancaman. Dalam Teori Security Dilemma disebutkan bahwa negara-negara yang memiliki perspektif ketidakamanan cenderung untuk saling mendekat [2]. Ekonomi umumnya menjadi kepentingan nasional yang mendorong banyak negara untuk melakukan kerja sama [3]. Namun demikian, pertahanan dan keamanan menjadi salah satu kepentingan nasional kedua yang mendasari kerja sama utamanya bagi negara-negara yang satu kawasan [4].

Terdapat perubahan geopolitik yang signifikan di Asia Tenggara. Ini ditandai dengan adanya pakta pertahanan keamanan yakni sebagai bagian dari kerja sama tiga negara yakni Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (United Kingdom). Pakta Pertahanan AUKUS, yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, resmi diresmikan pada September 2021 dengan fokus pada kerja sama dalam bidang militer dan keamanan. Salah satu aspek utama dari kesepakatan ini adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan upaya bersama dalam menanggulangi ancaman siber yang semakin canggih. Selain itu, Australia akan memperoleh teknologi untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh.

Pakta pertahanan trilateral, yang dikenal sebagai AUKUS, sekarang menjadi perhatian utama ASEAN sebagai badan regional. Meskipun pakta tersebut berdampak pada stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut, namun kesinambungan dari pakta tersebut menimbulkan tantangan bagi ASEAN. ASEAN menghadapi kendala dalam menangani pakta pertahanan ini karena pertentangan dengan prinsip-prinsip dan struktur keanggotaan ASEAN itu sendiri [5].

Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, transparansi dan dialog terbuka antara AUKUS dan negara-negara regional menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meredakan kekhawatiran. Di saat yang bersamaan negara-negara yang terdampak dengan adanya pakta pertahanan ini seperti Indonesia dan Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya juga harus mengatasi ketegangan dua kekuatan yakni China dan Amerika Serikat. Karena itu, pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara utamanya Indonesia dan Malaysia yang memiliki profil politik dominan di kawasan Asia Tenggara perlu ditingkatkan [5]. Pakta Pertahanan AUKUS telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia, terutama dalam konteks dinamika keamanan dan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Pertama-tama, AUKUS telah memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah dan masyarakat Indonesia serta Malaysia terkait peningkatan ketegangan dan perlombaan senjata di kawasan tersebut. Kedua negara merasa perlu untuk memantau perkembangan AUKUS dengan cermat karena potensi dampaknya terhadap stabilitas regional [6]. Selain itu, adanya AUKUS juga dapat memperkuat peran Tiongkok dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Tiongkok mungkin akan memperhatikan lebih cermat tentang bagaimana negara-negara di kawasan merespons dan menanggapi kehadiran militer dari negara-negara Barat seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat [7].

Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia mungkin juga mencari peluang untuk memperkuat kerja sama pertahanan mereka sendiri atau mencari kemitraan baru dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik sebagai respons terhadap dinamika yang dihasilkan oleh AUKUS. Hal ini dapat mencakup peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan atau bahkan memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengatasi dampak AUKUS. Dampak AUKUS terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia mencakup peningkatan kekhawatiran terkait stabilitas regional, perubahan dinamika keamanan, dan kemungkinan pergeseran strategis yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik [5].

Sebagai negara yang merdeka dan diakui sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki

sejumlah hubungan kerja sama secara bilateral hingga multilateral dengan banyak negara. Di tingkat Asia Tenggara, dimana Indonesia memiliki peran penting di kawasan, maka negara-negara Asia Tenggara menjadi salah satu kunci kerja sama baik bilateral dan multilateral. Salah satu kerja sama strategis di kawasan Asia Tenggara ialah kerja sama Indonesia dengan Malaysia.

Kerja sama Indonesia dan Malaysia didasari oleh hubungan strategis yang dinamis dan kompleks. Pada tanggal 31 Agustus 1957, Indonesia dan Malaysia secara resmi telah menjalin hubungan diplomatik, Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang menyatakan kemerdekaan Malaysia. Pada saat itu, terjadinya perubahan status Kantor Perwakilan yang sebelumnya Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menjadikan (Alm) Dr. Mohd Razif sebagai Duta Besar RI pertama untuk Malaysia. Pada tahun 1963-1965, hubungan bilateral dari kedua negara tersebut juga mengalami era konfrontasi, namun para pemimpin kedua negara tersebut pada saat itu telah melakukan keputusan yang bijak agar terjalinnya hubungan bilateral yang baik kembali sehingga pada tahun 1967 kedua negara tersebut menjadi pembuka jalan dalam pembentukan organisasi regional di ASEAN [8].

Awal mula kerja sama pertahanan Indonesia dengan Malaysia dilakukan pada 11 Agustus 1966, kerja sama tersebut merupakan program pemetaan di Indonesia. Lalu, pada tahun 1971 terjadinya kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia kembali. Kerja sama tersebut ditandai dengan pembentukan forum General Border Committee (GBC) dan High Level Committee (HLC) [9]. Kedua forum tersebut merupakan salah satu tempat bagi negara Indonesia maupun Malaysia untuk melakukan koordinasi dan melakukan kebijakan lintas sektoral bilateral. Forum tersebut melibatkan berbagai kelompok seperti Kepolisian, Kemlu, Kemendagri, Angkatan Bersenjata, dan juga Kementerian yang terkait dari kedua negara tersebut. Hal tersebut dilakukan agar masalah perbatasan dapat diatasi oleh kedua forum tersebut seperti, masalah keamanan tradisional yang ditangani oleh HLC dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dikoordinasikan oleh GBC. Pada tahun 1980-an, kerja sama forum tersebut diwadahi oleh suatu lembaga yang disebut Indonesia-Malaysia Defence Cooperation Program (DCP)[10].

Di laman Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia pada 21 Februari 2023 mengunggah kunjungan kehormatan perdana Menteri Pertahanan Malaysia. Perdana menteri pertahanan Malaysia yang baru Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan berkunjung dan disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kemhan Jakarta. Menhan Prabowo mengapresiasi lawatan Menhan Malaysia ini yang resmi dilantik pada 3 Desember 2022. Menurut Menhan Prabowo, kunjungan dan perkenalan ini menunjukkan adanya hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Malaysia. Seperti yang beliau sampaikan saat kunjungan tersebut, yaitu; "Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas pertama yang dikunjungi, merupakan indikasi adanya hubungan bilateral pertahanan yang baik antara kedua negara," Menhan Prabowo juga memberikan dukungan penuh dan meyakini bahwa pengalaman dan kapasitas Menhan Mohamad bisa meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan yang telah berjalan baik selama ini [11].

Karena sebagai negara tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek, seperti warisan sejarah, agama, bahasa, dan kebudayaan, hubungan Indonesia Malaysia tidak terlepas dari sejarah yang menautkan kedua bangsa. Hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapatnya banyak aspek kesamaan tidak serta-merta menjadi pengikat yang kuat bagi hubungan kedua negara [12]. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia mengalami pemulihan pasca peristiwa supersemar. Setelah Supersemar ditandatangani oleh Presiden Soekarno, proses normalisasi hubungan bilateral kedua negara kembali diagendakan oleh Pres-

iden Soeharto. sehingga menjadi lebih terbuka. Perundingan Bangkok, merupakan perundingan formal tingkat pertama para pejabat Indonesia dan Malaysia untuk membicarakan prinsip – prinsip normalisasi. Perundingan diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, dilakukan antara Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Hubungan bilateral yang cukup dinamis dengan Malaysia yang diawali konfrontasi oleh Presiden soekarno untuk menolak konsep federasi Malaysia pada tahun 1963. Dan terbentuklah security arrangement 1972 [13].

Kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia telah berkembang sejak tahun 1963 hingga 2023, tepatnya sudah 60 tahun. Maka itu penting untuk mengetahui bagaimana MOU membuat kerja sama bidang pertahanan dan keamanan menjadi berbeda daripada kesepakatan kerja sama pada periode-periode sebelumnya. Ini akan bermanfaat untuk mengetahui kemajuan penting dari pelaksanaan kerja sama utamanya dalam menciptakan keamanan kolektif Indonesia dan Malaysia dalam satu kawasan yang sama yakni Asia Tenggara. Kajian penelitian terdahulu belum mencerminkan substansi perubahan geopolitik di Asia Tenggara dan belum memuat landasan hukum dalam MOU Kerja sama Pertahanan Keamanan Tahun 2022. Berdasarkan kajian atas penelitian terdahulu, ditemukan bahwa fokus kajian kerja sama pertahanan keamanan Malaysia Indonesia pada implementasi kerja sama dalam kegiatan GBC (General Border Committee) [13]. Penelitian lain menggunakan dampak sosial dan ekonomi kerja sama ini terhadap Indonesia (Nugrahaningsih, 2015). Sedangkan penelitian lain melihat pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam bentuk membangun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang dianggap belum optimal [14].

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini mengambil tema kerja sama bilateral pertahanan keamanan negara dengan Indonesia dan Malaysia sebagai unit analisis negaranya. Mengingat yang diteliti adalah fenomena hubungan antara Indonesia dan Malaysia, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi kerja sama bilateral utamanya bidang pertahanan dan keamanan Indonesia dan Malaysia pasca penandatanganan MOU Kerja sama Bilateral di tahun 2022.

Tinjauan Pustaka

Dasar teori atau konsep dari rumusan masalah diatas yaitu kerja sama bilateral. Seperti yang ada di Latar Belakang Masalah dengan kerja sama bilateral dalam pertahanan tentunya akan lebih memperkokoh pertahanan satu sama lain. Kerja sama bilateral adalah suatu kerja sama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara.

Kebanyakan kerja sama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerja sama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semanya sendiri.

Kerja sama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif yang bermaksud untuk menganalisis dinamika dan implementasi kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Indonesia yang kerap disebut dengan kerjasama Malindo yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2022.

Terdapat 3 informan utama di Kementerian Pertahanan yang memberikan keterangan deskriptif tentang berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian. Sebagai bagian dari ethical clearance dalam penelitian maka peneliti hanya memuat informasi yang dianggap layak dan menggunakan dokumen yang diizinkan untuk diketahui publik tanpa mengungkap hal-hal yang dianggap bagian dari rahasia kedua negara dalam implementasi kerjasama ini. Penelitian ini juga diperdalam dengan temuan-temuan dari berbagai sumber sebagai bagian dari triangulasi sumber yakni dengan memanfaatkan pemberitaan dan foto kegiatan yang dapat ditemukan dalam arsip publik dan publikasi nasional.

Analisis kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan interpretatif dengan memaknai dari transkrip wawancara dan menghubungkan dengan fokus penelitian. Ini menghasilkan interpretasi terhadap temuan-temuan yang didapatkan, menghubungkannya dengan teori atau literatur yang relevan. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna dari data dan menjelaskan implikasi dari temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan analisis dan interpretasi, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai pertanyaan penelitian yang diajukan, yang harus didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Malaysia, negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara, memiliki profil yang unik dan menjadi mitra penting bagi Indonesia. Malaysia adalah negara federal di Asia Tenggara dengan penduduk dengan tiga ras utama yakni China, Asia Selatan dan Melayu. Baik Indonesia maupun Malaysia adalah dua negara paling penting dengan peran signifikan dalam organisasi negara-negara Asia Tenggara (Southeast Asian Nation). Kerjasama Malindo dilaksanakan dalam beberapa bentuk utama yakni di tingkat kementerian pertahanan yang disebut dengan High Level Committee (HLC) dan General Border Committee (GBC).

Forum Dialog dalam HLC

HLC adalah komite yang berfokus pada isu-isu strategis tingkat tinggi antara Malaysia dan Indonesia. Komite ini melibatkan pejabat tinggi, seperti menteri atau pejabat eksekutif, yang bertugas membahas dan memutuskan arah kebijakan bilateral. HLC biasanya membahas isu-isu besar yang berdampak luas, seperti hubungan ekonomi, diplomasi, tenaga kerja migran, dan kerja sama di forum internasional.

Salah satu contoh nyata dari peran HLC adalah pembahasan mengenai peningkatan investasi bersama di kawasan perbatasan antara Kalimantan dan Sabah/Sarawak. Dalam pertemuan HLC, kedua negara menyepakati kerja sama ekonomi untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang melibatkan pembangunan infrastruktur bersama dan memfasilitasi investasi lintas negara. Hasil dari diskusi ini adalah pengembangan proyek infrastruktur besar yang meningkatkan ekonomi lokal di wilayah perbatasan.

Selain itu, HLC juga berperan dalam koordinasi kebijakan di forum internasional, seperti ASEAN. Dalam beberapa kesempatan, Malaysia dan Indonesia menggunakan HLC untuk menyelaraskan

posisi diplomatik mereka dalam isu-isu regional, seperti keamanan di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, HLC berperan sebagai platform bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan strategis dalam forum internasional dan meningkatkan pengaruh mereka di kawasan.

Dalam isu tenaga kerja migran, HLC memainkan peran penting dalam menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui diskusi di HLC, kedua negara menyetujui peningkatan hak-hak tenaga kerja migran, seperti pengaturan upah minimum dan perlindungan hukum yang lebih baik. Hal ini mencerminkan peran strategis HLC dalam mengatasi isu lintas negara yang mempengaruhi jutaan orang.

Pada tahun 2022, High Level Committee (HLC) antara Malaysia dan Indonesia diisi oleh pejabat-pejabat tinggi dari kedua negara yang memiliki tanggung jawab dalam berbagai bidang strategis. Pertemuan HLC ini berfungsi sebagai wadah untuk membahas isu-isu penting yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, mulai dari keamanan, ekonomi, hingga diplomasi. Pejabat yang menghadiri pertemuan ini berasal dari kementerian yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam agenda HLC, baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia.

Dari pihak Indonesia, peran penting dalam HLC biasanya diemban oleh Menteri Pertahanan. Ini karena salah satu fokus utama dari HLC adalah isu-isu keamanan dan pertahanan lintas batas yang menjadi kepentingan kedua negara, khususnya di wilayah perbatasan, seperti Kalimantan dan Sabah/Sarawak. Menteri Luar Negeri Indonesia juga terlibat dalam pertemuan ini, mengingat hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri menjadi bagian penting dari kerja sama strategis antar kedua negara. Selain itu, Menteri Dalam Negeri sering kali hadir untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan keamanan internal dan pengelolaan wilayah perbatasan. Tidak jarang, pejabat dari kementerian lain seperti Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Perdagangan juga turut serta, terutama jika diskusi mencakup masalah tenaga kerja migran atau peningkatan perdagangan bilateral.

Sementara itu, dari pihak Malaysia, peran yang serupa diemban oleh Menteri Pertahanan Malaysia, yang juga memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan pertahanan perbatasan kedua negara. Selain itu, Menteri Luar Negeri Malaysia ikut ambil bagian dalam diskusi strategis terkait hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri Malaysia, khususnya dalam kerja sama dengan Indonesia. Menteri Dalam Negeri Malaysia juga berperan dalam HLC, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan pengaturan perbatasan. Dalam beberapa pertemuan, pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional serta Kementerian Tenaga Kerja Malaysia juga diundang, khususnya ketika pertemuan membahas masalah perlindungan tenaga kerja migran dan peluang investasi antara kedua negara.

Dalam pertemuan HLC pada tahun 2022, topik-topik yang dibahas mencakup berbagai masalah strategis yang berpengaruh besar pada hubungan bilateral kedua negara. Salah satu topik utama yang sering diangkat adalah peningkatan kerja sama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia, terutama dalam hal investasi bersama di kawasan perbatasan dan pengembangan infrastruktur. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja migran juga menjadi isu sentral dalam diskusi HLC, mengingat banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kedua negara juga membahas langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan, seperti patroli gabungan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, HLC 2022 menjadi platform penting bagi Malaysia dan Indonesia untuk membangun konsensus dalam menghadapi berbagai tantangan bilateral, sekaligus memperkuat kerja sama strategis dalam berbagai sektor. Pejabat tinggi dari kedua negara bekerja sama dalam menetapkan arah kebijakan yang berdampak besar pada hubungan jangka panjang, memastikan

bahwa kerja sama ini berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan.

Pengamanan Perbatasan

Sementara itu, GBC lebih fokus pada isu-isu teknis dan operasional terkait perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. GBC terdiri dari pejabat keamanan dan militer dari kedua negara, yang bertugas menangani masalah-masalah perbatasan, seperti keamanan, patroli gabungan, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan infrastruktur perbatasan.

Salah satu contoh konkret dari peran GBC adalah patroli gabungan yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan ATM (Angkatan Tentera Malaysia) di wilayah perbatasan Kalimantan-Sabah. Patroli ini bertujuan untuk mencegah kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Dalam beberapa operasi patroli gabungan, aparat keamanan kedua negara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dalam skala besar, yang dilakukan melalui jalur-jalur terpencil di perbatasan.

Selain itu, GBC juga berperan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Contohnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong (Kalimantan) dan Tebedu (Sarawak) merupakan hasil dari kesepakatan dalam GBC untuk memperkuat kontrol perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pos-pos ini juga memfasilitasi perdagangan legal antara kedua negara, sehingga meningkatkan perekonomian lokal.

Masalah kebakaran hutan lintas batas juga sering menjadi perhatian GBC. Kedua negara menghadapi tantangan kebakaran hutan di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sabah, yang sering kali menghasilkan asap lintas batas yang mengganggu kesehatan masyarakat di kedua negara. Melalui GBC, tim tanggap darurat dari kedua negara bekerja sama untuk memadamkan kebakaran, menggunakan teknologi seperti drone dan helikopter pemadam, serta melakukan patroli rutin untuk mencegah kebakaran lebih lanjut.

Secara garis besar, High Level Committee (HLC) dan General Border Committee (GBC) memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerja sama Malindo antara Malaysia dan Indonesia. HLC berfokus pada kebijakan strategis tingkat tinggi yang mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, diplomasi, dan tenaga kerja migran, sementara GBC menangani masalah-masalah teknis dan operasional terkait keamanan dan pengelolaan perbatasan. Kedua komite ini penting dalam memastikan hubungan bilateral antara kedua negara berjalan dengan baik dan stabil, serta mampu mengatasi tantangan yang muncul di berbagai bidang.

Kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan kedua negara meliputi hal perbatasan, keamanan, dan kebijakan pertahanan. Terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan analisis terhadap wawancara mendalam. Wawancara ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam hal perbatasan, keamanan, dan kebijakan pertahanan. Dari wawancara ini, terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan implementasi kerja sama kedua negara.

Pertama, wawancara menggarisbawahi sejumlah masalah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, termasuk konflik terkait patok batas, penyelundupan narkoba, dan masalah kriminalitas lintas batas. Implementasi kerja sama antara kedua negara fokus pada penyelesaian konflik batas melalui dialog dan koordinasi lebih lanjut, serta memperkuat kerja sama antara kepolisian kedua negara dalam menangani kasus-kasus penyelundupan narkoba lintas batas dan tindakan preventif seperti melakukan patroli bersama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbatasan tetap aman dan terkontrol dengan baik.

Kedua, General Border Committee (GBC) Malindo merupakan forum penting yang membahas

berbagai isu terkait perbatasan. Namun, wawancara ini mengungkapkan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan GBC Malindo. Tujuan awal GBC yang berfokus pada mengatasi komunis di perbatasan sudah tidak relevan dan perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini, seperti peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan dan penanganan kriminalitas. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pertemuan GBC perlu ditingkatkan dengan fokus pada satu pertemuan yang mencakup semua isu penting, sehingga tidak terjadi duplikasi dan pemborosan sumber daya.

Kerjasama di Berbagai Bidang

Kerjasama PT PAL

PT PAL Indonesia, sebagai perusahaan galangan kapal terkemuka yang bergerak dalam industri pertahanan maritim, telah mengambil langkah strategis dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Boustead Naval Shipyard (BNS) Malaysia. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun kapal multirole support ship (MRSS) pertama bagi Malaysia, yang akan diproduksi di Indonesia. Langkah ini merupakan pencapaian signifikan yang tidak hanya memperkuat industri maritim pertahanan di kedua negara, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam mendukung operasi angkatan laut secara lebih efektif.

Proyek pembangunan MRSS ini mencerminkan potensi besar dalam pengembangan kemampuan pertahanan regional melalui kolaborasi industri. Dengan pengalaman PT PAL dalam membangun kapal militer kelas dunia, kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan kapal yang sesuai dengan kebutuhan operasional Malaysia, sambil memanfaatkan teknologi canggih dan kemampuan produksi dari PT PAL. Kerja sama ini juga mendukung upaya kedua negara untuk memperkuat kemandirian dalam industri pertahanan maritim dan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain.

Selain aspek produksi, kerja sama pertahanan Indonesia dan Malaysia juga terlihat dalam program pendidikan militer yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini, program-program tersebut perlu dikeluarkan dari forum perbatasan dan dikelola secara terpisah di bawah MoU Pertahanan. Dengan pengaturan yang lebih spesifik ini, kolaborasi pendidikan militer akan lebih fokus dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kapasitas personel kedua negara.

Latihan gabungan dan program pendidikan militer yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen kedua negara dalam meningkatkan interoperabilitas dan kapasitas pertahanan. Kerja sama yang lebih terstruktur melalui MoU Pertahanan akan memungkinkan peningkatan koordinasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dalam meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata Indonesia dan Malaysia.

Kerjasama PT Pindad

Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan industri pertahanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang mengatur kerja sama strategis di bidang ini. Salah satu elemen penting dari kerja sama tersebut adalah keterlibatan PT. Pindad (Perindustrian Angkatan Darat), perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). PT. Pindad berperan besar dalam memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara melalui produksi berbagai peralatan militer seperti kendaraan tempur, senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.

Kerja sama ini mencakup transfer teknologi, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas dalam pengembangan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Dengan adanya MoU ini, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk memperkuat kapabilitas pertahanan regional secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar, serta mendorong sinergi dalam inovasi teknologi pertahanan.

Melalui kolaborasi dengan PT. Pindad, Malaysia memiliki kesempatan untuk mengakses teknologi serta produk pertahanan buatan Indonesia, sementara Indonesia dapat memperluas pasar industrinya sekaligus meningkatkan keahlian teknis dalam memenuhi kebutuhan pertahanan kawasan. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengembangan produk, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas pertahanan kedua negara melalui pengujian bersama, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta memajukan industri pertahanan nasional yang lebih kompetitif di pasar global.

Tantangan Kerjasama Malindo

Wawancara yang telah dilakukan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks perbatasan, keamanan, dan kebijakan pertahanan. Beberapa aspek penting yang diangkat dalam wawancara ini termasuk patroli maritim bersama, operasi penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, latihan militer bersama, pendidikan dan pelatihan pertahanan, serta industri pertahanan.

Patroli maritim bersama merupakan salah satu bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ini melibatkan patroli koordinasi di perairan dan darat di wilayah perbatasan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan narkoba. Sebagai contoh, patroli koordinasi laut di wilayah pelawan Langkawi telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan perairan kedua negara.

Operasi penegakan hukum bersama juga menjadi fokus penting dalam kerja sama antara kedua negara. Kerja sama ini melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menanggulangi kriminalitas lintas batas dan menjaga stabilitas di kawasan perbatasan.

Pertukaran informasi intelijen merupakan komponen krusial dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Malaysia. Melalui pertukaran informasi ini, kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi ancaman keamanan yang mungkin timbul di wilayah perbatasan, serta meningkatkan efektivitas operasi keamanan yang dilakukan.

Latihan militer bersama antara Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapasitas pertahanan kedua negara. Latihan ini melibatkan berbagai jenis latihan, baik yang bersifat gabungan maupun yang khusus untuk satu matra tertentu. Misalnya, latihan gabungan yang melibatkan tiga angkatan atau latihan khusus antara pasukan TNI dan Tentera Diraja Malaysia.

Pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan juga merupakan bagian dari kerja sama antara kedua negara. Program ini mencakup pertukaran personel militer untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di masing-masing negara. Selain itu, kunjungan kehormatan dan partisipasi dalam pameran pertahanan juga dilakukan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral.

Kerja sama dalam industri pertahanan mencakup produksi dan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibutuhkan oleh kedua negara. Misalnya, Indonesia pernah menjual pe-

sawat angkut CN235 yang digunakan oleh angkatan udara Malaysia. Selain itu, ada juga kerja sama bisnis to bisnis dalam industri pertahanan yang melibatkan perusahaan swasta dan BUMN dari kedua negara.

Wawancara juga menyinggung beberapa tantangan dalam implementasi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dalam struktur organisasi yang menyebabkan kurangnya koordinasi efektif antara lembaga yang berbeda. Misalnya, ada ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, yang menyebabkan kesulitan dalam memberikan instruksi dan arahan yang jelas.

Selain itu, ada juga tantangan dalam hal diplomasi dan hubungan strategis. Meskipun Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun, hubungan diplomasi pertahanan dan ekonomi Indonesia lebih dekat dengan negara lain seperti Australia, Korea Selatan, dan Vietnam. Hal ini menyebabkan kerja sama dengan Malaysia sering kali kurang diprioritaskan dan dianggap bisa ditunda.

Secara keseluruhan, wawancara-wawancara ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan dan pertahanan telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dengan penyesuaian dan peningkatan koordinasi, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi keamanan dan stabilitas kedua negara.

Kesimpulan

Kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Malaysia menjadi landasan penting dalam hubungan kedua negara. Hal ini didasarkan pada sejarah panjang, kedekatan geografis, dan budaya, serta kepentingan strategis bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, kedua negara telah melakukan berbagai langkah konkret. Pertukaran informasi intelijen menjadi salah satu elemen utama, dimana keduanya berbagi data tentang berbagai ancaman keamanan seperti terorisme, perompakan laut, perdagangan narkoba, dan cybercrime. Selain itu, mereka juga aktif dalam melakukan latihan militer bersama untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman.

Tidak hanya itu, patroli maritim bersama juga telah dijalankan guna mengamankan wilayah perairan kedua negara dan mencegah pelanggaran kedaulatan. Di bidang industri pertahanan, keduanya berkolaborasi untuk mengembangkan kemampuan pertahanan nasional. Partisipasi dalam mekanisme ASEAN juga menjadi bagian integral dari upaya keduanya dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan regional.

Kerja sama ini telah menghasilkan sejumlah manfaat yang signifikan. Stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara terjaga dengan baik, sementara pertahanan kedua negara juga semakin kuat. Selain itu, hubungan bilateral pun mengalami peningkatan seiring dengan membangun kepercayaan dan saling pengertian. Kerja sama ini juga memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan perdamaian dan kerja sama di tingkat regional.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Perbedaan dalam sistem pertahanan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian politik regional merupakan beberapa di antaranya. Meskipun demikian, penting untuk terus memperkuat kerja sama bilateral ini dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di berbagai bidang pertahanan dan keamanan.

Untuk itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kerja sama ini. Meningkatkan

frekuensi pertukaran informasi intelijen, melaksanakan latihan bersama yang lebih kompleks, serta memperkuat kerja sama dalam pengembangan industri pertahanan merupakan beberapa di antaranya. Selain itu, partisipasi aktif dalam mekanisme ASEAN dan menyelenggarakan forum dialog regional juga akan membantu memperkuat kerja sama ini. Dengan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Malaysia dapat menciptakan kawasan Asia Tenggara yang lebih aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Kesimpulannya, kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan ini merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara. Dengan terus memperkuat kerja sama ini, kedua negara dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa rekomendasi penelitian berikutnya yang dapat dieksplorasi untuk memperdalam pemahaman tentang kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Malaysia: Pertama, sebuah penelitian yang memfokuskan pada dampak Pakta Pertahanan AUKUS terhadap Kerja sama Bilateral Indonesia-Malaysia akan menjadi topik yang relevan. Penelitian ini akan memperinci bagaimana AUKUS mempengaruhi dinamika kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara, serta memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari perjanjian tersebut.

Kedua, sebuah studi yang menganalisis Peran Kerja sama Bilateral dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kerja sama bilateral telah berkontribusi dalam mengatasi ancaman seperti terorisme, perompakan laut, dan cybercrime. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas mekanisme kerja sama yang ada dan mengidentifikasi peluang serta tantangan di masa depan.

Selanjutnya, penelitian yang membandingkan Kerja sama Bilateral Indonesia-Malaysia dengan Negara-Negara Lain di Kawasan akan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerja sama bilateral antar negara. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain di kawasan, rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Sebuah penelitian tentang Prospek Kerja sama Bilateral di Era Industri 4.0 akan membahas bagaimana teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan robotika memengaruhi kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara. Penelitian ini akan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan interoperabilitas militer dan memerangi cybercrime. Terakhir, sebuah studi yang menganalisis Peran Aktor Non-Negara dalam Kerja sama Bilateral akan mengeksplorasi bagaimana organisasi masyarakat sipil, think tank, dan sektor swasta dapat berkontribusi dalam memperkuat kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui berbagai metode penelitian seperti studi kasus, analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta survei, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia, Malaysia, dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

References

- [1] "Perpetual peace: A philosophical sketch," in *Kant: Political Writings*, 2nd ed., H. S. Reiss, Ed. Cambridge University Press, 1991, pp. 93–130.

- [2] K. Booth and N. J. Wheeler, *The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics*. Palgrave Macmillan, 2008.
- [3] M. S. Feldstein and N. B. of Economic Research, *International Economic Cooperation*. University of Chicago Press, 1988.
- [4] R. Jervis, "Cooperation under the security dilemma," *Center for Arms Control and International Security, University of California, Los Angeles*, 1977.
- [5] W. Ramadani and A. Haitam, "Hambatan asean sebagai organisasi regional dalam merealisasikan pertahanan dan keamanan terkait kerja sama aukus (australia, united kingdom, dan united states)," *Kajian Hubungan Internasional*, vol. 2, no. 2, pp. 126–134, 2023.
- [6] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menyikapi potensi eskalasi konflik di kawasan indo-pasifik sebagai dampak dari kesepakatan aukus," nov 2021. [Online]. Available: <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>
- [7] C. Kalanuzza, "Reviewing china-aukus tensions through constructivism," *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, vol. 3, no. 2, pp. 56–68, 2023.
- [8] Kemlu, "Malaysia," 2018, retrieved 2023. [Online]. Available: <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>
- [9] Kemhan, "Menhan prabowo laksanakan kunjungan kehormatan ke perdana menteri malaysia," oct 2021, retrieved May 30, 2023. [Online]. Available: <https://www.kemhan.go.id/2021/10/28/menhan-prabowo-laksanakan-kunjungan-kehormatan-ke-perdana-menteri-malaysia.html>
- [10] B. J. Maulidsyah, "Kerja sama keamanan indonesia-malaysia dalam menanggulangi human trafficking di wilayah perbatasan kalimantan barat-serawak," Ph.D. dissertation, Universitas Pasundan, Bandung, 2018.
- [11] Kemhan, "Terima kunjungan perdana menhan malaysia, menhan prabowo optimis hubungan bilateral semakin erat," feb 2023, retrieved June 20, 2023. [Online]. Available: <https://www.kemhan.go.id/2023/02/21/terima-kunjungan-perdana-menhan-malaysia-menhan-prabowo-optimistis-hubungan-bilateral-se>
- [12] L. Sunarti, "Politik luar negeri malaysia terhadap indonesia, 1957-1976: Dari konfrontasi menuju kerja sama," *Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah Susungalur*, p. 66, 2014.
- [13] E. S. Mohamad Wieldan Akbar, "Kerja sama general border committee indonesia – malaysia dalam menjaga perbatasan darat," *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, vol. 3, 2019.
- [14] M. H. Zulkarnain and K. Roisah, "Kebijakan pengelolaan pertahanan dan dampak kebijakannya di perbatasan indonesia malaysia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 4, pp. 490–515, 2018.